

PERAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM MENGURANGI KESENJANGAN SOSIAL DI INDONESIA

Oleh:

Ahmad Puli Faganza (2008204083)

Ridwan Shoheh (2008204084)

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Kesenjangan sosial yang terjadi hampir tidak bisa dihilangkan dan dihindari, tetapi hanya bisa diminimalisir agar tidak menjadi sesuatu yang dapat dipermasalahkan dan dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Karena sangat tidak mungkin setiap orang dalam suatu masyarakat memiliki pendapatan yang sama. Hal ini dapat dilihat dari adanya peluang dan manfaat yang tidak sama untuk kedudukan sosial yang berbeda dalam bermasyarakat. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang dan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat dan membuat perbedaan. Yang kemunculan kesenjangan diakibatkan oleh pembangunan atas ekonomi yang kurang merata. Dan dengan upaya penekanan terhadap kesenjangan sosial akan mempermudah SDGs akan lebih berkembang dan dapat mengalami pembangunan secara terstruktur.

Kata kunci: Kesenjangan, Sosial, Pembangunan, Pemerataan.

ABSTRACT

Social inequality can hardly be eliminated and avoided, but can only be minimized so as not to become something that can be questioned and acceptable to society as a whole. It is impossible for everyone in a society to have the same income. This can be seen from the existence of unequal opportunities and benefits for different social positions in society. Sustainable Development Goals (SDGs) are development that is oriented to meet current and future needs and aims to maintain the improvement of people's economic well-being in a sustainable manner. Social inequality is a state of social imbalance that exists in society and makes a difference. The emergence of inequality is caused by development of an economy that is less evenly distributed. And with efforts to emphasize social inequality will make it easier for the SDGs will be more developed and can experience development in a structured manner.

Keywords: *Inequality, Social, Development, Equalization.*

PENDAHULUAN

Isu kesenjangan sosial sebenarnya telah menjadi topik diskusi sejak lama dan telah banyak dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. Penelitian yang dilakukan terhadap isu kesenjangan sosial bermanfaat untuk mengetahui gambaran kesenjangan sosial di Indonesia. Kesenjangan sosial merupakan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok, dimana terjadi ketidakadilan, ketimpangan dalam pendistribusian hal-hal atau aspek-aspek yang dianggap penting dalam suatu masyarakat luas (Aziz, et al, 2023).

Kesenjangan sosial umumnya terjadi antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada dasarnya kesenjangan sosial yang terjadi hampir tidak bisa dihilangkan dan dihindari, tetapi hanya bisa diminimalisir agar tidak menjadi sesuatu yang dapat dipermasalahkan dan dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Aziz & Nur'aisah, 2021). Karena sangat tidak mungkin setiap orang dalam suatu masyarakat memiliki pendapatan yang sama. Hal ini dapat dilihat dari adanya peluang dan manfaat yang tidak sama untuk kedudukan sosial yang berbeda dalam bermasyarakat. Maka tidak heran jika masalah kesenjangan selalu hadir di hampir setiap wilayah, baik di negara berkembang maupun di negara maju sekalipun (Aziz, 2021).

Dengan minititik beratkan pembahasan makalah pada apa yang dimaksud atas *Sustainable Development Goals* (SDGs), maksud atas kesenjangan sosial yang disertai dengan bagaimana keadaan kesenjangan sosial di Indonesia. Selain kedua hal tersebut, juga melibatkan bagaimana peran *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mengurangi kesenjangan sosial di negara Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pengartiannya yakni pembangunan yang memiliki orientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. SDGs memiliki tujuan guna menjaga eskalasi

atas kesejahteraan ekonomi pada masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan atas kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang ekstensif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga eskalasi kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kementrian PPN/Bappenas).

Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana diketahui sebagai sebuah program pembangunan yang berskala lanjutan dengan 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan rencana pembangunan dunia yang bertujuan guna mencapai suatu titik kesejahteraan bagi manusia dan kelestarian bumi (A. Soemitra, 2018). SDGs disahkan pada tanggal 25 September 2015 oleh para pemimpin dunia bertempat di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs berisi 17 tujuan/*goals* dengan 169 target dan 241 indikator merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak tahun 2016 hingga 2030 guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Ada pula 17 goals/ tujuan dari SDGs antara lain, ialah(1) tanpa kemiskinan,(2) tanpa kelaparan,(3) kehidupan sehat serta sejahtera,(4) pembelajaran bermutu,(5) kesetaraan gender,(6) air bersih serta sanitasi layak,(7) tenaga bersih serta terjangkau(8) pekerjaan layak serta perkembangan ekonomi,(9) industri, inovasi serta infrastruktur,(10) berkurangnya kesenjangan,(11) kota serta pemukiman yang berkepanjangan,(12) mengkonsumsi serta penciptaan yang bertanggung jawab,(13) penindakan pergantian hawa,(14) ekosistem lautan,(15) ekosistem daratan,(16) perdamaian, keadilan serta kelembagaan yang tangguh serta(17) kemitraan buat menggapai tujuan.

SDGs sendiri diisyaratkan selaku kelanjutan dari Millennium Development Goals(MDGs) yang disepakati oleh negara- negara anggota PBB pada tahun 2000 serta berakhir pada akhir tahun 2015. Tetapi keduanya mempunyai perbandingan yang mendasar, baik dari segi substansi ataupun proses penyusunannya. MDGs cuma muat 8 tujuan, 21 sasaran serta 60 penanda. Sasarannya cuma bertujuan buat kurangi setengah dari masing-masing permasalahan pembangunan yang tertuang dalam tujuan serta sasaran. MDGs tidak membagikan kedudukan yang balance kepada negeri

maju, hendak namun membagikan tanggung jawab yang lebih besar untuk negeri tumbuh serta kurang tumbuh buat menggapai tujuan pembangunannya.

Secara proses MDGs pula mempunyai kelemahan sebab penataan serta penerapannya bertabiat eksklusif serta sangat birokratis tanpa kedudukan pemangku kepentingan non- pemerintah, semacam organisasi warga sipil(civil society organization), universitas/ akademisi, zona bisnis serta swasta, dan kelompok yang lain. Tidak semacam pendahulunya, SDGs menanggulangi permasalahan pembangunan secara lebih komperhensif baik secara kualitatif(dengan memikirkan permasalahan pembangunan yang tiidak tercakup dalam MDGs) serta kuantitatif(dengan fokus pada tiap tujuan serta sasarannya). SDGs pula bertabiat umum, membagikan penyeimbang untuk seluruh negeri(negeri maju, tumbuh serta kurang tumbuh) buat berkontribusi penuh dalam pembangunan, sehingga tiap negeri mempunyai kedudukan serta tanggung jawab yang sama dalam menggapai SDGs.

B. Pengertian Kesenjangan Sosial

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Kesenjangan berasal dari kata “senjang” yang berarti:

- ↗ Tidak simetris ataupun tidak sama bagian yang kiri serta yang kanan.
- ↗ Berlainan sekali ataupun berbeda.
- ↗ Ada jurang pemisah

Kesenjangan merupakan keadaan ketidakmerataan akses terhadap sumber energi ekonomi, sehingga bisa dikatakan kalau kesenjangan merupakan kerawanan yang besar sebab permasalahan kesenjangan erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan (Sukmana, 2005).

Kesenjangan sosial ialah sesuatu kondisi ketidakseimbangan sosial yang terdapat dalam warga serta membuat perbandingan. Permasalahan kesenjangan sosial merupakan ketidaksesuaian antar elemen warga yang membahayakan kehidupan kelompok sosial (Bakhri, et al, 2023). Apabila terjalin konflik antar elemen yang terdapat amaka bisa menyebabkan rusaknya ikatan sosial selaku kendala dalam kehidupan kelompok ataupun warga. Permasalahan sosial timbul sebab terdapatnya perbandingan antara nilai- nilai warga dengan kenyataan yang terdapat

Kesenjangan sosial pula ialah distribusi yang tidak menyeluruh (ketidaksetaraan serta ketidakadilan) yang dirasakan oleh orang serta kelompok yang dikira berarti untuk dalam sesuatu warga serta evaluasi yang tidak sama dan pengecualian bersumber pada status sosial serta style hidup, pula hak serta kewajiban tidak di distribusikan secara menyeluruh ataupun ketidaksamaan akses buat memperoleh ataupun menggunakan sumber energi yang ada. Sumber energi bisa berbentuk kebutuhan primer, semacam pembelajaran, kesehatan, perumahan, bisnis serta peluang kerja. Dapat pula dalam wujud kebutuhan sekunder, semacam fasilitas pembangunan usaha, fasilitas perjuangan hak asasi, fasilitas saluran politik, pemenuhan pengembangan karir serta lain- lainnya (Bakhri, et al, 2021).

Faktanya, kata kesenjangan sosial ini sering kali diidentikan dengan permasalahan kemiskinan tak terlepas bagi negara Indonesia (Dharmayanti & Aziz, 2024). Bila diamati secara seksama, kemiskinan sendiri merupakan permasalahan yang cukup rumit. Yang mana hal tersebut berlapis-lapis dari golongan atas hingga golongan bawah. Kesenjangan yang diidentikan dengan kemiskinan ini tidak hanya berupakekurangan dalam finansialnya saja, namun berikut juga dengan sandang dan pangan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal inilah yang menjadi sebuah belenggu penjerat bagi mereka yang bermasalah dalam finansial ataupun kemiskinan (Martin, 2011).

Pada kondisi perekonomian negara Indonesia diperkirakan dalam hitungannya mencapai presentase pertumbuhan hingga 6.1% yang mana memang angka ini dinilai telah melampaui perkiraan yang hanya ditargetkan sekitar 58%. Dalam produk domestik yang ada memiliki sebuah peningkatan hingga Rp6.422,9 triliun pada tahun 2010, padahal sebelumnya hanya mencapai Rp5.603,9 triliun. Dengan begitu, pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi dalam hitungan produk domestik inilah yang menjadi salah satu pemicu akan kesenjangan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat (Kompas, 8/2/2011).

Sebuah pernyataan yang mengejutkan diungkapkan oleh salah satu pengamat ekonomi, yang mana masyarakat yang memiliki penghasilan atau income tinggi hingga kini tetap bertahan sebagai penyongkong utama atas pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Hal tersebut dapat diindikasikan

melalui kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Lantas, masih ada jalan keluar dari kondisi ini dengan memperluas lapangan pekerjaan disektor perindustrian. Dengan begitu, perlahan masyarakat di negara Indonesia akan mulai terlepas dan mampu bangkit dari belenggu kesenjangan sosial (Yanuar, 2011).

Kesenjangan sosial yang memiliki ranah cakupan yang cukup luas sayangnya tidak hanya dilihat atau dinilai dari angka kemiskinan dan pendapatan perkapita pada suatu negara saja (Fatmasari, et al, 2022). Hal tersebut juga menimbulkan sebuah dampak yang berarti bagi kondisi psikologis sebuah negara. Sehingga kesenjangan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah permasalahan yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi disertai dengan dampak yang besar. Salah satu substansi atas kesenjangan sendiri dimana ketidak merataan atas suatu akses atas sumber daya ekonomi yang dialami oleh tiap-tiap negara, tidak terlepas juga dengan negara Indonesia (Fatmawati, et al, 2022).

C. Upaya Penekanan Jumlah Kesenjangan Sosial di Negara Indonesia Melalui SDGs

Sustainable Deveopment Goals (SDGs) atau yang lebih mudah dikatakan sebagai pembangunan yang bersifat berkelanjutan memiliki titik fokus pengerjaan pada suatu pembangunan yang memiliki jangka pemenuhan atas kebutuhan yang panjang. Yang mana kebutuhan saat ini, hingga kebutuhan lain yang akan mendatang. Titik pemfokusan pada permasalahan kesenjangan tentu berada pada sektor ekonomi, lingkungan dan sosial. Hal yang menjadi sebuah pemantik atas pemikiran dimana perkembangan dan pembangunan harus tetap berjalan dan dilangsungkan yakni perihal suatu tuntutan akan peranan manusia sebagai makhluk sosial yang menjalani kehidupan masing-masing dengan tetap saling bersinggungan satu sama lain (Haerisma, et al, 2023).

Pada faktanya, kemunculan kesenjangan diakibatkan oleh pembangunan atas ekonomi yang kurang merata pada suatu daerah atau negara. Hal ini tentu berdampak pada kesejahteraan yang diperhitungkan dari hasil pendapatan yang diperoleh dari perkapita penduduk yang tidak sama, bahkan bisa jadi mengalami ketidak seimbangan kondisi ekonomi antara

suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Bila hal tersebut tetap dibiarkan begitu saja, hal yang mengkhawatirkan justru dimana wilayah yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung diabaikan perihal pembangunan ekonomi yang dapat membantu proses penyongkongan pendapatan penduduk wilayah yang bersangkutan (Harjadi, et al, 2021).

Bentuk atau upaya yang dapat dilakukan guna menekankan jumlah kesenjangan sosial memiliki empat macam (Sadono, 2019). Pertama, sebuah kesinambungan atau konektivitas dan infrastruktur yang harus diperhatikan demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang diharuskan untuk merata dan mampu didapatkan oleh setiap masyarakat diberbagai wilayah negara Indonesia. Maka, hal ini tentu memerlukan adanya suatu kebijakan atas perindustrian dalam aspek ekonomi yang dilangsungkan secara adil (Harjadi, et al, 2023). Disamping itu, kondisi alam di negara Indonesia didominasi dengan adanya perairan seperti halnya laut. Sehingga, pada infrastrukturnya juga harus dimaksimalkan pada transportasi laut. Jadi tidak hanya transportasi darat saja yang dibangun dan dikembangkan, juga dengan transportasi laut yang difasilitasi sedemikian rupa agar mendukung penekanan kesenjangan sosial yang terjadi hingga saat ini. Dengan begitu, bila semua aspek infrastruktur telah mengalami pembangunan yang merata akan memicu pemerataan atas kesinambungan atau konektivitas atas ekonomi antar wilayah bahkan daerah di negara Indonesia.

Disamping itu, pembangunan infrastuktur yang dilakukan pun secara meratapun akan menunjukkan sebuah keefektivitasan yang baik dalam upaya penunangan atas pendapatan yang diperoleh masyarakat. Untungnya, upaya atas penekanan jumlah kesenjangan sosial ini mampu dibuktikan pada masa pemerintahan presiden RI Jokowi. Dimana pemusatan pembangunan ekonomi dipusatkan pada pulau Jawa dan Sumatra, sehingga taraf atas perekonomian dan kesejahteraan dari kedua pulau akan diprediksi meningkat seiring dengan berkembangnya pembangunan ekonomi yang dilakukan (Layaman, et al, 2021). Begitupun dengan pulau Kalimantan yang kabarnya hingga saat ini masih dalam proses pembangunan ekonomi dengan tujuan yang sama yakni pemerataan ekonomi serta penekanan kesenjangan sosial melalui infratsruktur dan konektivitas.

Hal kedua yang menjadi salah satu dari empat upaya penekanan kesenjangan ekonomi ini terletak pada aspek pendidikan. Yang mana memang dari kedua sisi antara pertumbuhan atas ekonomi dengan pembangunan yang berkelanjutan memiliki kesibambungan yang dinilai bertimbal balik (Jaelani, et al, 2021). Mudahnya bila dilogikakan, bagaimana bisa pemerataan pembangunan ekonomi akan berjalan sesuai dengan rencana dan prediksi bilamana sumber daya manusia yang dimiliki tidak memumpuni dalam hal yang bersangkutan. Maka, tentu saja pendidikan juga menjadi salah satu macam atas upaya penekanan ini. Sehingga bila terdapat banyak sumber daya manusia yang memumpuni, diprediksikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi pada suatu wilayah yang masih tertinggal akan berubah dan beralih menjadi berkembang sebagaimana wilayah lainnya yang terlebih dahulu mencapai perkembangan atas perekonomiannya (Nasir, et al , 2022).

Hal tersebutlah yang mendasari sebuah pertanyaan yang terbesit, mengapa diperlukanya pendidikan. Karena memang tidak bisa ditinggalkan atau dikesampingkan begitu saja. Pendidikanlah yang menjadi modal awal, menjadi garda terdepan dalam menyongsong kondisi dan keadaan pada suatu permasalahan baik yang sedang dihadapi saat ini ataupun yang akan mendatang. Karena tentu saja permasalahan akan selalu bermunculan dan berdatangan manakala suatu wilayah atau negara berusaha membenahi kualitas negaranya.

Lapangan pekerjaan merupakan hal ke tiga yang menjadi salah satu macam dari bentuk upaya penekanan kesenjangan sosial yang terjadi. Hal yang telah diketahui oleh khalayak umum, dimana semakin tinggi jumlah penaggugran maka semakin rendah juga pendapatan perkapita penduduk wilayah yang bersangkutan. Maka dari itu, pentingkan pengadaan lapangan pekerjaan ini menjadi salah satu urgensi bagi upaya penekanan kesenjangan.

Kata pengangguran sendiri memiliki artian dimana seseorang yang telah dianggap mampu untuk bekerja dan tergolong dalam angkatan kerja namun ia tidak bekerja atau lebih tepatnya tidak memiliki suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapat bagi mereka. Sehingga secara tidak langsung dalam menjalankan kehidupanya, para pengangguran hanya bisa

bergantung pada orang lain atau orang terdekat disekitar mereka (Wadud & Layaman, 2023). Lantas, bila didasarkan pada pengertian pengangguran seperti yang telah dijabarkan bukan berarti melibatkan segala umur yang ada di negara Indonesia. Hanya sebagian yang telah dianggap mampu dan telah mencapai usia produktif sebagai bentuk produktivitasnya.

Hal terakhir yang menjadi salah satu bentuk upayanya ialah ketahanan atas pangan dan energi dari suatu daerah. Hal ini dikarenakan sudah banyak tokoh yang mengungkapkan bahwasanya ketahanan atas pangan dan energi menjadi hal yang sangat penting dalam suatu negara (Wartoyo & Haerisma, 2022). Terlebih pada proses atau upaya pembangunan perekonomian suatu negara ataupun wilayah dari negara yang bersangkutan. Seperti halnya pembangunan atas perekonomian yang ada di negara India. Faktor utama yang menjadi penguat yakni ketahanan atas pangan, sehingga negara India berhasil perlahan melangkah untuk menekankan kesenjangan sosial yang ada di negara mereka pada tahun 2006. Dengan menguatkan kembali sektor pertanian di negara India (Ravallion, 2006).

Selain itu, sumber daya energipun menjadi salah satu indikator yang paling penting. Akan tetapi tidak semua energi dapat diperbarukan atau diperbarui. Sehingga hal yang dilakukan guna mengadakan gerakan antisipasi bila menghadapi situasi dan kondisi yang kritis seperti itu suatu negara dituntut akan kewajibannya untuk menyediakan langkah alternatif untuk menggantikan energi yang telah punah tersebut (Wartoyo, et al, 2022).

D. *Sustainable Development Goal (SDGs)* sebagai Bentuk Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perkembangan atas suatu hal merupakan hal yang baik. Terlebih pada pembangunan ekonomi yang dilakukan demi membangun perekonomian yang positif dan sehat bagi suatu negara. Hal ini tentu mampu menaikkan standar kehidupan bagi manusia. Pembangunan bila dilihat dari sisi keislamannya diharuskan untuk memperhatikan dan memepntingkan prinsip-prinsip atas keadilan yang tidak memiliki potensi bentuk diskriminatif bagi salah satu atau suatu daerah atau wilayah. Disamping itu, perekonomian

sendiri tidak dapat diputus kesinambungannya dengan kehidupan masyarakat Islam.

Ekonomi Islam sendiri merupakan suatu sistem yang moderat. Yang mana hal tersebut tidak terdapat sebuah kecondongan atau acuan pada sistem yang komunis ataupun liberal. Tentu saja acuan ekonomi Islam tetap didasarkan al- Qur'an dan Hadits. Hal ini tidak jauh dari tujuan supaya manusia dalam kehidupannya tidak mementingkan kesejahteraan duniawi saja. Juga diimbangi dengan bagaimana kesejahteraan yang akan mendatang, yang dipercaya dengan sebutan akhirat.

Guna memberikan suatu jaminan atau mengukuhkan keterjaminan atas keadilan sosial yang berada pada lingkungan masyarakat, tentu pada ekonomi Islam memberikan beberapa arahan terhadap nilai-nilai yang menjadi sebuah jalan positif dalam proses perkembangan dan pembangunan perekonomian negara yang disertai dengan aktivitas transaksi dan kegiatan investasi (Yusuf, et al, 2021). Hal pertama yakni dimana manusia memiliki atas kepemilikan harta yang bersifat mutlak. Dalam Islam, memang segala sesuatu yang ada pada diri manusia saat ini hanyalah titipan dari Allah SWT. Sehingga, harapan yang muncul terhadap pemerintah yakni dimana harta atau sumber daya yang ada di suatu negara tidak hanya digunakan untuk membangun duniawi saja, melainkan dengan mempersiapkan sebaik mungkin bekal ibadah yang dapat membangun kesejahteraan setiap bagian atau setiap lapisan di masyarakat. Dengan tidak memihak atau bercondong pada seseorang guna mengambil keuntungan bagi suatu pihak saja (Yasin, et al, 2023).

Dalam kefungsiannya, keseimbangan memiliki suatu prinsip atas bagaimana mempertahankan keberimbangan antara keseimbangan dengan keadilan sosial. Selain itu, bila masih tetap disandarkan pada ekonomi Islam. Ada baiknya juga bilamana memanfaatkan sebuah kekayaan alam yang dimiliki tiap-tiap negara yang telah diberikan atau dikaruniakan terhadap manusia oleh Allah sebaiknya dimanfaatkan secara adil dan merata demi menghindari kesenjangan sosial yang tergolong sangat rawan bagi keutuhan suatu negara. Dalam pembangunan ekonomi sangat dilarang

bagi suatu tindakan yang tidak adil dan hanya mementingkan wilayah atau daerah-daerah tertentu saja.

Disamping apa yang telah diuraikan pada penjelasan diatas, memang Islam memiliki sistem tersendiri bagi mengelola kekayaan dan pertahanan negara. Seperti halnya nilai instrumental yang ada dan disandarkan ada pembangunan perekonomian. Pada hal tersebut tentu meliputi hak-hal sebagaimana berikut:

- a. Larangan melakukan riba pada setiap kepentingan yang melibatkan antara pemerintah dengan penduduk atau masyarakat,
- b. Melakukan suatu kerjasama yang baik yang mampu menopang dan menjadi langkah awal dalam menyongsong suatu wacana dan rencana suatu negara dalam upaya SDGs.
- c. Pemberian jaminan atas sosial terhadap seluruh penduduk atau manusia yang hidup dalam suatu lingkup negara. Sehingga tidak ada pemantik atas suatu perkara yang melibatkan ketidak terjaminan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dengan begitu, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam akan mendatangkan suatu pelyang bagi pemerintah dan masyarakat guna mengadakan suatu perkembangan atas sumber daya alam yang menjadi suatu lapangan pekerjaan.

PENUTUP

Dalam kesenjangan sosial yang terjadi pada suatu wilayah ataupun negara tentu memiliki jalan keluar yang dapat digunakan untuk membangun perekonomian yang memiliki sifat berkepanjangan. Yang mana *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diberikan suatu langkah yang mampu menjadikan suatu wilayah dapat berakih pada masa keterpurukan. Jadi, hingga kini yang dapat ditarik kesimpulanya yakni seharusnya pemerintah juga turut ikut serta memelihara perekonomian suatu negara. Hal ini ada mewujudkan pembangunan perekonomian yang bersifat berkepanjangan dengan banyak aspek yang mengikuti serta bersinggungan. Sebenarnya ada hal hal lain pula yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menangani atau menekankan tingkat kesenjangan sosial yang

terjadi di negara Indonesia. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibrata, J. A., Sasmitadiharjo, A., & Rahmarilla, M. D. (2020). Peran Pemuda dalam Sustainable Development Goals Kesebelas: Studi Kasus Kampung Jodipan Malang. *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(02).
Agama dan Budaya, 2(2), 42-49.
- Amalia, N. M. (2021). PERAN PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABILITAS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA: Studi Kasus Kader PMII Kota Semarang. *PROSIDING MUKTAMAR PEMIKIRAN DOSEN PMII*, 1(1), 719-728.
- Arianto, Z. (2019). Upaya Pemerintahan Joko Widodo dalam Mendorong
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwo, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Bakhri, S., Nurbaiti, F., & Yusuf, A. A. (2023). The Most Influential Factors On Stock Prices In The JII Index. *Jurnal Manajemen*, 27(3), 612-631.
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goals (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Quantitative Economics Journal*, 6(3).
- Dharmayanti, D. ., & Aziz, A. . (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In

- Indonesia . *Migration Letters*, 21(4), 1410–1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086> di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional FEKON-UT* (pp. 1-8).
- Etika, E., & Sidiq, S. S. (2019). Kesenjangan sosial di kecamatan pangean kab.
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.
- Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- Ferawati, R. (2018). Sustainable development goals di Indonesia: Pengukuran dan agenda mewujudkannya dalam perspektif ekonomi islam. *Kontekstualita*, 33(02), 143-167.
- Goals (SDGs) Dalam Ekonomi Pembangunan Indonesia.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Hakim, A. (2020). Menekan Angka Kesenjangan Sosial Di Indonesia Melalui Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Baabul Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488.
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia.

- Indonesia, S. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals*. Statistics Indonesia.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan Islahiha, N. A., Frita, N., & Maulana, R. (2019). Penerapan Sistem Perekonomian Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia. *PKM-P*, 3(2).
- Ismail, A. (2019). NGO dalam Diplomasi Ekonomi: Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDG's) Poin Pengentasan Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(1), 1-12.
- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia/Cidade Inteligente e Turismo Halal durante a Pandemia Covid-19 na Indonésia.
- Juned, M., Kusumastuti, R. D., & Darmastuti, S. (2018). Penguatan peran pemuda dalam pencapaian tujuan ketiga Sustainable Development Goals (SDGs) di Karang Taruna Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok. In *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Kediri.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementrian Kennedy, P. S. J. (2020). Modul Ekonomi Pembangunan Sustainable Development Kuantan singingi provinsi riau.
- Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.
- LEONARDO, L., Nisyak, H., & Supli, N. A. (2021). *ANALISIS PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TUJUAN PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Soemitra, A. (2018). Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs).

- Najoan, B., Kawengian, D. D., & Harilama, S. H. (2017). Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 6(3).
- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Biefing Paper*, 2, 1-25.
- Patiung, M. (2017). Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal's Kota Pembangunan Sosial. pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Putri, S. Y. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) PADA KASUS STUNTING DI INDONESIA. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 5(2),
- Rahayu, R. Permasalahan Sosial: Gelandang dan Pengemis di Yogyakarta dalam
- Rahman, A. B. (2012). MDG Ver 2.0: Menuju Sustainable Development Goals (SDGs)
- Setiawan, J. H., & Caroline, C. (2020). PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN DIFUSI INOVASI AGENDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS UNTUK MEMBANGUN KESADARAN PEMUDA MENGENAI MASALAH SAMPAH PLASTIK. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 6(2), 100-100.
- Soemitra, A. (2018). Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan
- Suhanto, S., & Yumetri Abidin, Y. (2021). Laporan Pengabdian Pada Masyarakat:" Sosialisasi Peran UMKM Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Sustainable Development Goals".
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Sosio Informa*, 16(3).
- Tristananda, P. W. (2018). Membumikan Education for Sustainable Development

- Wadud, A. M. A., & Layaman. (2023). The Impact of Islamic Branding on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as an Intervening Variable. In *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges* (pp. 95-104). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 21-45.
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110-139.
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).
- YUSUF, A. A., SANTI, N., & RISMAYA, E. (2021). The Efficiency of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 239-247.